

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Eksistensi Ilmu Hubungan Internasioal saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri (*a real distinct discipline*), kemandirian ini merupakan proses deretan ilmu-ilmu. Dimana Hubungan Internasional dapat dilihat dari sifat interdisipliner studi Hubungan Internasional yang jelas kita tidak dapat mengabaikan sejarah perkembangan studi Hubungan Internasional. Walaupun pada sewaktu-waktu tertentu telah mengalami kemajuan serta perubahan di dalam beberapa bidang yang menyesuaikan kemajuan teknologi dunia (Darmayadi, 2015:10).

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner dengan pengertian ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang-bidang ilmu lain dalam mengembangkan

kajian-kajiannya. Dewasa ini, kajian dan ruang lingkup Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti yang dikemukakan oleh Trygve Mathisen terjemahan Suwardi Wiraatmadja, bahwa Hubungan Internasional mempunyai arti “Semua aspek Internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua negara dan mempengaruhi tingkah laku yang terjadi atau berasal disuatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain”. Hubungan Internasional yang kini makin banyak diterapkan negara-negara di dunia demi mencapai *nation interest* adalah melalui kerjasama regional. Sedangkan aktor dari hubungan internasional itu sendiri bisa saja merupakan *state actor* atau juga aktor *non state actor*.

Selain itu Menurut Robert Jackson & George Sorenson mengemukakan bahwa:

“Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global” (2005: 3).

Hubungan Internasional sebuah studi tentang hubungan antara para pelaku dalam upaya memenuhi kepentingan yang diembannya sehingga tercipta interdependensi dimana hubungan ini terjadi saling melintasi batas wilayah negara atau istilah *transnational*. Aleksius Jemadu menyatakan bahwa :

“Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46)”.

Hubungan Internasional yang pada awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, hal inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51).

Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan internasional, termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6).

Dalam Hubungan internasional mengkaji interaksi antara aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik itu *state actor* maupun *non state actor* meliputi negara bangsa, organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Studi Hubungan Internasional berusaha untuk menjelaskan berbagai interaksi antarnegara, masyarakat dan institusi yang melintasi batas-batas nasional, mulai dari studi tentang perang, damai, hingga kerja sama ekonomi dan konflik lingkungan (Bakry, 2016 : 59).

Pola hubungan atau interaksi hubungan internasional dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

Dalam pola hubungan tersebut kerjasama merupakan pola hubungan yang paling diharapkan. Sehingga dalam hubungan internasional perlulah memikirkan bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama secara adil dan saling menguntungkan, mencegah konflik dan untuk mengubah persaingan menjadi kerjasama (Rudy, 2003 : 2).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan suatu negara yang ingin atau harus tercapainya kebutuhan negara tersebut. Dapat dilihat dari sudut pandang realis, menurut Morgenthau (1948) kepentingan nasional adalah usaha suatu negara untuk mengejar *power* karena *power* adalah elemen penting yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Sementara menurut kontuktivis, kepentingan nasional adalah tujuan nilai yang ditetapkan dan dikonstruksikan dengan interaksi social dengan negara lain.

Kepentingan nasional juga merupakan istilah penting yang menggambarkan persepsi identitas negara dan membantu mendeskripsikan, memahami, dan memprediksikan perilaku (Glanville, 2005: 15)

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu :

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy. 2002 : 116).

Kepentingan nasional juga merupakan hal yang berhubungan dengan power suatu Negara. Negara biasanya akan menggunakan powernya untuk mencapai kepentingannya. Pandangan seperti ini seperti yang dijelaskan oleh Morgenthau. Lebih tepatnya pemahaman seperti ini berfokus pada perspektif realisme klasik yang tokohnya ialah Morgenthau (Sudjatmiko 2008 : 12).

Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya adalah

1. *Core/basic/vital interest*; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya merupakan contoh dari *core/basic/vital interest* ini.
2. *Secondary interest*; meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana

masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan dasar suatu negara dalam mempertahankan negaranya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut. Dalam memenuhi kepentingan nasional diatas, negara merumuskan kebijakannya (Morgenthau, 2010: 52-53).

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005 : 35).

2.1.3. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Hubungan kerjasama antar negara (Internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata

pergaulan internasional, disamping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005 : 121).

Sebuah negara menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan–kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

“Kerjasama yaitu proses–proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (Betsil, 2008 : 21).

2.1.3.1 Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu: Memelihara kepentingan nasional, Memelihara perdamaian, Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:28-29).

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Menurut T. May Rudy mengatakan bahwa :

“Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional” (T. May Rudy, 2002: 27).

Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliputi proses :

1. Rangsangan atau kebijakan actual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.

3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

(Perwita dan Yani, 2005:42)

Dougherty dan Pfaltze dikutip oleh Perwita & Yani mengatakan bahwa dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita & Yani, 2006 : 33-34).

Selain itu menurut Holsti dalam kerjasama dan hubungan bilateral dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi.

2.1.4 Ekonomi Politik Internasional

Berbicara mengenai Ekonomi Politik Internasional tidak akan lepas membahas tentang Ilmu Ekonomi itu sendiri, menurut Samuelson Nordhaus dalam bukunya Ilmu Makro Ekonomi, Ilmu Ekonomi memiliki pengertian Kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas”(Samuelson, 2001:4).

Ekonomi politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. lebih lanjut menurut Robert Gilpin dan Roger Tooze mendefinisikan bahwa Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional” (Perwita & Yani, 2005:75).

Selain itu Ekonomi Politik Internasional lalu berusaha untuk mengemukakan bahwa sebenarnya ekonomi mempunyai keterkaitan dengan politik (*power*). Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (negara) dan *market* (pasar). Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi

kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan *power* dan pengaruh (Gilpin, 2001:77).

2.1.5 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa :

1. Antara perorangan (individu dengan individu).
2. Antara individu dengan pemerintah suatu negara.
3. Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain
(Feriyanto,2015:10).

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas terjadinya perdagangan internasional antara lain: perbedaan harga barang, perbedaan hasil produksi, keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya :

1. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi.
2. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
3. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.

4. Adanya keberagaman selera terhadap suatu barang yang dihasilkan pada negara lain sehingga terbentuk transaksi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan ini.
5. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri yang dapat diberikan dan ditawarkan oleh negara lain.
6. Untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara dari perdagangan ekspor dan impor.
7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain sebagai konsekuensi adanya era globalisasi sehingga tidak suatu negara pun di dunia dapat hidup sendiri (Ekananda, 2014 4-7).

Teori perdagangan internasional menjelaskan komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Disamping itu, teori perdagangan internasional menunjukkan adanya keuntungan dari adanya perdagangan internasional (*gains from trade*). Beberapa teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik:
 - a. Kemanfaatan absolut (*absolut advantage*) oleh Adam Smith
 - b. Kemanfaatan relative (*comparative advantage*) oleh Jhon Stuart Mill
 - c. Biaya relative (*comparative cost*) oleh David Ricardo.
2. Teori Modern:
 - a. Faktor proporsi (Heckscher&Ohlin).

b. Kesamaan harga factor produksi (*factor price equalization*) oleh P. Samuelson.

c. Permintaan dan penawaran (teori parsial) (Norpin,2016:7)

Tujuan pokok penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah terbukanya pasar global demi terciptanya globalisasi dan serta mencari keuntungan masing-masing negara dengan negara lainya. Keuntungan ini disebut juga dengan keuntungan absolute (Ekananda, 2014:3).

2.1.5.1 Hambatan Perdagangan Internasional

Dalam kerjasama perdagangan internasional sering dijumpai hambatan atau rintangan yang pada dasarnya merugikan suatu negara. Hambatan tersebut berupa:

1. Tarif

Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. kebijakan ini dapat dilihat pada kenaikan harga barang. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea keluar. Tujuan dari tarif bea impor adalah membatasi permintaan konsumen menggunakan produk domestik karena Semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Perbedaan utama antara tarif dan proteksi lainnya bahwa tarif memberikan pemasukan kepada pemerintah sedangkan kouta tidak.

2. Kuota

Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang diperdagangkan. Contoh Ada tiga macam kouta yaitu: kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota impor adalah suatu pembatasan dalam jumlah barang impor, kuota produksi adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diproduksi, lalu kuota ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor. Suatu Tindakan untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang impor yang dilakukan secara sukarela disebut juga sebagai pembatasan ekspor sukarela (*Voluntary Export Restriction = VER*) VER adalah kesepakatan antara negara pengekspor dalam membatasi jumlah barang yang dijualnya ke negara pengimpor. Tujuan dari kouta ekspor adalah untuk mendapatkan keuntungan negara pengekspor agar dapat memperoleh harga yang lebih tinggi. Kuota produksi bertujuan untuk mengurangi jumlah ekspor yang diharapkan agar harga di pasaran dunia dapat ditingkatkan.

Tujuan utama pelaksanaan kouta adalah untuk melindungi produksi dalam negeri dari serbuan-serbuan luar negeri.

Dampak kebijakan kouta bagi negara importir :

- a. Harga barang melambung tinggi,
- b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang,
- c. Meningkatnya produksi dalam negeri.

Dampak kebijakan kouta bagi negara eksportir :

- a. Harga barang turun,

- b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah,
- c. Produksi di dalam negeri berkurang.

3. *Dumping* dan Diskriminasi Harga

Praktik diskriminasi harga secara internasional disebut dumping. Yaitu penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping ini dapat meningkatkan volume perdagangan serta menguntungkan bagi negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor terkadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri dapat mendorong pemerintah negara pengimpor agar memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi).

Kebijakan ini hanya berlaku sementara, harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar kemudian, setelah berhasil merebut serta menguasai pasar internasional. *Predatory dumping* dilakukan bertujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah itu persaingan di luar negeri mati maka harga di luar negeri akan di naikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan *predatory dumping*.

4. Subsidi

Kebijakan subsidi biasanya diberikan untuk menurunkan dalam biaya produksi barang domestik, sehingga harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah bertujuan untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga

yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kearah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.

5. Larangan Impor

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi (Raufaidah,2015:51-53)

2.1.6 Ekspor dan Impor

Ekspor adalah aktivitas penjualan dari dalam ke luar negeri. Dengan aktivitas ekspor ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta meningkatkan pendapatan berupa devisa. Pada umumnya barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas minyak bumi dan gas alam (migas) contohnya minyak tanah, bensin, solar dan elpiji. Serta barang-barang yang termasuk (nonmigas) antara lain: hasil industri, hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut dan danau, hasil tambang nonigas (bijih emas, bijih nehel, bijih tembaga, batubara).

Impor adalah pengusaha atau lembaga-lembaga nonpemerintah yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi ke dalam negeri. Kegiatan impor ini dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah, harga yang lebih murah tersebut antara lain karena negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak, negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, dan negara penghasil biasa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak (Ekananda 2014: 9-11).

Strategi ekspor ini berkaitan dengan masalah peluang status komoditas ekspor sebagai *market leader*. Empat alternatif strategi yang lazim dikenal dengan *four generic international strategies* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertama, *dynamic high technology strategy (DHTS)* yaitu strategi yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadikan *market leader* melalui inovasi teknologi yang tepat.
2. Kedua, *low of stable technology strategy (LSTS)*. Strategi ini memberikan peluang terhadap perusahaan untuk menjadi *market leader* karena kemampuannya dalam penyediaan suku cadang yang terdapat secara global.
3. Ketiga, *advanced management skill strategy (AMSS)*. Memberikan peluang perusahaan untuk dapat menjadi *market leader* dalam menetapkan manajemen yang tepat. Untuk itu, perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam manajemen pemasaran, keuangan, dan organisasi.
4. Keempat, *production market rationalization strategy (PMRS)*. Memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menjadikan *market leader* dalam menekankan biaya produksi melalui pendekatan lokasi. Karena, lokasi perusahaan relative “dekat” dengan pasar global sehingga dapat menekan *handling cost* seperti biaya pengangkutan dan penyimpanan.
(Halwani2003:79)

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional pada dasarnya mengkaji interaksi antara aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik itu *state actor* maupun *non state actor*

interaksi antarnegara, masyarakat dan institusi yang melintasi batas-batas nasional, studi tentang perang, damai, konflik bahkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling bergantung pada satu dengan yang lainnya dimana kerjasama ini di bentuk atas dasar Kepentingan nasional dengan berbagai tujuan serta faktor penentu akhir dimana akan mengarahkan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya dalam memenuhi kepentingan nasional.

Hubungan bilateral merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam menggambarkan Hubungan Internasional timbal balik antara kedua belah pihak Negara yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu: Memelihara kepentingan nasional, Memelihara perdamaian dan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jepang merupakan negara yang dikenal dengan perekonomian yang maju namun negara ini masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam.

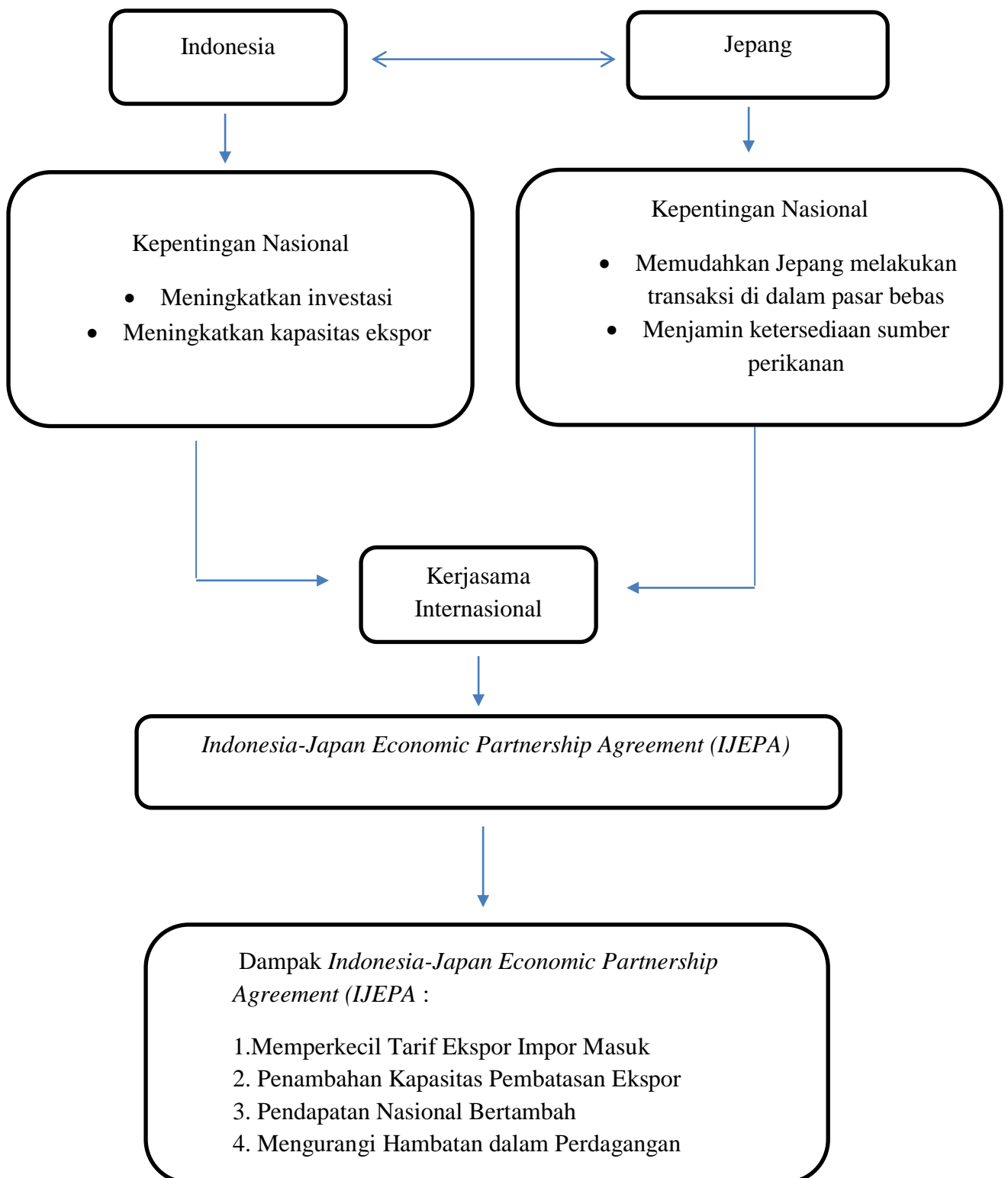
Jepang juga merupakan mitra dagang utama di sektor perikanan yang mencakup sekitar 16% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Dunia yaitu 4,6 Milyar USD. Indonesia merupakan negara pemasok ikan terbesar negara Jepang, selain itu negara Jepang pun mengakui bahwa Indonesia memiliki Kualitas terbaik di bidang perikanan. Banyak masyarakat Jepang yang mengkonsumsi ikan, khususnya ikan tuna yang menjadikan banyaknya permintaan tertinggi masyarakat Jepang terhadap Indonesia di dalam bidang perikanan.

Oleh karena itulah kedua negara ini sepakat untuk melanjutkan pembicaraan ke tingkat negosiasi. Dalam membentuk kerjasama bilateral di bidang ekonomi, yakni *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Pada dasarnya kerjasama ini dibentuk untuk dapat liberalisasi dan menghapus sebagian besar tarif bea masuk ke kedua negara. Kerjasama ini sangat diperlukan karena akses masuk ke pasar Jepang lebih ketat dan dibentengi oleh hambatan nontarif, terutama tuntutan standar kualifikasi produk yang tinggi. Melalui kerja sama peningkatan kapasitas, produk Indonesia diharapkan dapat memenuhi standar pasar Jepang sekaligus menembus pasar global. Namun, baik Jepang dan Indonesia mempunyai resistensi yang tinggi terhadap liberalisasi di sektor-sektor tertentu.

Ikan tuna adalah salah satu sektor perikanan yang paling diminati di Jepang, karena rata-rata masyarakat di Jepang mengonsumsi hasil laut. Kerjasama IJEPA ini dibentuk untuk kerjasama kedua negara agar menghapus sebagian besar dan penetapan tarif ke Jepang. Indonesia memberikan keistimewaan yang diberikan kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus tarif di 93 % dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Ekspor Jepang ke Indonesia dalam pos-pos tarif khusus tersebut telah mencakup 93 % dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk produk klasifikasi *fast-track*, sekitar 35 % dari pos tarif akan diturunkan hingga 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Untuk produk klasifikasi normal *track*, sekitar 58 % dari pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0 % dalam masa tiga hingga 15 tahun sejak berlakunya IJEPA. Sisanya yang 7% merupakan produk yang

dikecualikan dari pos tarif IJEPA yang memberikan keuntungan dari kedua belah pihak negara.

Oleh karena itulah peneliti ingin lebih memfokuskan pada penelitian Kerjasama Indonesia-Jepang melalui *Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dalam Perdagangan Ekspor Ikan Tuna (2015-2017). Kerangka Pemikiran yang akan peneliti sajikan seperti penjelasan di atas diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini seperti berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran